



Pencegahan Fraud Dana Desa Melalui Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intenal: Studi Kasus di Kecamatan Delanggu

Triawan Hidayat ^{1*}, dan Heni Susilowati ²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern Kartasura; Jawa Tengah; e-mail : triawanhidayat082@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern Kartasura; Jawa Tengah; e-mail : heni@stiestekom.ac.id

* Corresponding Author : Triawan Hidayat

Abstract: Transparent and accountable management of village funds is essential for mitigating corruption and fraudulent action that adversely affect the community. This study aims to evaluate the influence of financial reporting compliance and internal control system on fraud prevention in the management of village funds, specifically in the villages of Delanggu District. This study utilised a quantitative technique through a survey approach, collecting data via questionnaires delivered directly to 64 village authorities using a comprehensive sampel strategy. Data analys is was performed with multiple linear regressions. The results demonstrate that financial reporting compliance and internal control system concurrently and partially exert a positive and significant impact on fraud prevention. This discovery validates that enhancing supervision and executing financial governance are essetial for establishing transparent and accountable village administration. This study indicates the necessity to enhance the competencies of village officials and establish a standardizen internal control system to bolster fraud prevention and promote transparent and accountable management of village funds.

Keywords: Financial Reporting Compliance; Internal Control System; Fraud Prevention

Abstrak: Pengelolaan dana desa yang transparan maupun akuntabel sangat penting untuk memitigasi korupsi dan tindakan fraud yang merugikan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah sejauh mana kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan serta penerapan sistem pengendalian internal dapat berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa, khususnya di wilayah desa-desa yang berada di Kecamatan Delanggu. Pendekatan yang dipakai dalam temuan ini yaitu metode kuantitatif dengan teknik survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada 64 aparat desa menggunakan strategi sampel komprehensif. Analisis data dilaksanakan dengan regresi linier berganda. Temuan ini menunjukkan bahwasanya kepatuhan terhadap pelaporan keuangan maupun penerapan sistem pengendalian internal, baik diuji secara simultan maupun parsial, memberikan pengaruh positif serta signifikan pada pencegahan terjadinya kecurangan (fraud). Penemuan ini memvalidasi bahwasanya peningkatan pengawasan dan pelaksanaan tata kelola keuangan sangat penting untuk membangun pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Studi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi aparatur desa perlu membangun sistem pengendalian internal yang terstandarisasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecurangan (fraud) serta mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Kepatuhan Pelaporan Keuangan; Sistem Pengendalian Internal; Pencegahan Fraud

1. Pendahuluan

Pengelolaan dana desa yang efektif sangat penting untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan dalam tata kelola desa. Seiring bertambahnya dana desa yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan dana tersebut secara tepat dan semakin intensif, pemerintah berkomitmen untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara efektif guna

Naskah Masuk: 4 September 2025
Revisi: 6 Desember 2025
Diterima: 13 Februari 2026
Terbit: 2 Maret 2026
Ver. Skrg.: 2 Maret 2026



Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted for possible open
access publication under the
terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
(CC BY SA) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

memaksimalkan manfaat bagi masyarakat desa. Akan tetapi, kenyataannya banyak desa menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan dana dan praktik fraud yang merusak integritas pengelolaan keuangan desa [1].

Sumber daya keuangan desa diambil dari APBN yang selanjutnya distribusikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten maupun kota. Ketentuan ini sejalan pada Permenkeu No. 190/PMK.07/2021 mengenai Pengelolaan Dana Desa. Dana ini dialokasikan untuk memperlancar tata kelola dan melaksanakan berbagai inisiatif, pembangunan, memberdayakan masyarakat setempat, dan memberdayakan masyarakat desa. Berdasarkan data periode 2017-2023, terjadi peningkatan alokasi dana desa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

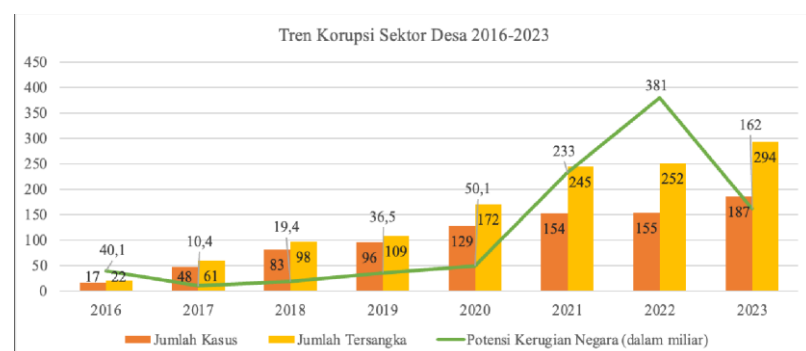
Tabel 1. Anggaran Dana Desa pada periode tahun 2017 hingga 2023

No	Tahun	Besaran Anggaran
1	2017	Rp. 59,8 Triliun
2	2018	Rp. 59,9 Triliun
3	2019	Rp. 69,8 Triliun
4	2020	Rp. 71,2 Triliun
5	2021	Rp. 72,0 Triliun
6	2022	Rp. 68,0 Triliun
7	2023	Rp. 69,8 Triliun

Sumber: Kemenkeu APBD

Tabel. 1 menjelaskan bahwasanya anggaran dan kas desa jumlahnya sangat besar berkisar antara 59,8 triliun sampai dengan 72,0 triliun, dengan rata-rata dalam satu desa dapat mengelola dana sebesar Rp 903 juta. Melihat kondisi ini perlu dilakukannya pengawasan supaya tidak terjadi tindak fraud pada pemanfaatan dana kas desa tersebut.

Penyediaan anggaran yang relatif besar untuk setiap desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan desa sebagai elemen penting dalam pembangunan. Namun, jika pengelolaan dana tersebut tidak dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka potensi penyalahgunaan dana desa menjadi sangat tinggi, yang dapat mengarah pada praktik korupsi oleh aparat desa. Menurut pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)[2], sektor dana desa sering kali menduduki peringkat teratas dalam tren korupsi, dan menunjukkan bahwasanya sektor ini menjadi fokus utama bagi penegak hukum. Berikut adalah grafik pertumbuhan adanya korupsi di tingkat desa:



Gambar 1. Korupsi di Sektor Desa: Grafik Tahun 2016-2023

Sumber: Laporan Hasil Monitoring ICW 2023

Kecurangan mampu dicegah dengan memberikan kewajiban pada pemerintah desa agar patuh pada peraturan perundang-undangan tentang pelaporan keuangan, meliputi penyusunan laporan relasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Hal ini dapat dicapai dengan mengajukan permohonan kepada otoritas terkait. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pelaporan keuangan dianggap sebagai wujud akuntabilitas kepada publik serta pemerintah pusat.

Keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan memiliki peran yang krusial dalam memperkuat fungsi pengawasan publik guna mencegah terjadinya fraud [3].

Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dapat memitigasi fraud, karena peningkatan kepatuhan aparat desa berkorelasi dengan penurunan kemungkinan terjadinya fraud [4]. Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh [3] diperoleh temuan yang menyatakan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan secara substansial meningkatkan penangkalan fraud dalam tata kelola keuangan desa. Peningkatan kepatuhan dalam pelaporan keuangan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus memperkuat langkah-langkah pengawasan, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan keuangan menjadi peran krusial dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilaksanakan oleh [4], [5] mengindikasikan bahwasanya kepatuhan atas standar pelaporan keuangan berkontribusi positif dalam mendukung langkah minimalis kecurangan (fraud). Sebaliknya, penelitian yang dilaksanakan oleh Rahimah [6] menggambarkan bahwasanya penyusunan laporan keuangan tidak memberikan dampak signifikan terhadap langkah-langkah antisipasi kecurangan (fraud).

Penyelenggaraan keuangan desa tidak boleh disalahgunakan sebagai wadah berkembangbiaknya “koruptor kecil” di desa. Dengan demikian, penyusunan struktur pengendalian internal yang komprehensif sangat krusial dalam menjaga pengelolaan keuangan desa terhadap fraud. Sistem ini berfungsi sebagai strategi pencegahan yang dapat memitigasi risiko penyalahgunaan dana [7]. Natasia [8] Menyatakan bahwasanya sistem pengendalian internal secara langsung mempengaruhi tata kelola perusahaan yang efektif, yang pada gilirannya menentukan kualitas pelaporan organisasi. Menurut Fajrin [9] penerapan tata kelola desa yang baik pada tingkat organisasi terkecil, seperti desa sangatlah krusial. Hal ini bertujuan guna mencapai keseimbangan serta keseimbangan dalam penyaluran dana yang diperoleh dari pada masyarakat maupun sokongan yang diberikan oleh otoritas pusat. Pada sisi lain Audelia dan Kristianti [10] menyatakan bahwasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya keseriusan semua pihak dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi sistem pengendalian internal yang menyentuh seluruh lini dalam organisasi. Zahrotin [11] menyatakan bahwasanya penerapan tata kelola tingkat desa berdasarkan pengelolaan desa yang baik akan menghasilkan pelaporan yang baik serta akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian terdahulu mengungkap kekurangan penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan dalam pelaporan keuangan serta penerapan sistem pengendalian internal atas usaha pencegahan kecurangan di tingkat desa, sementara mayoritas literatur yang tersedia berfokus pada perusahaan. Selain itu, hasil penelitian yang ada cenderung bervariasi, dengan mayoritas menunjukkan pengaruh positif, namun ada juga yang menemukan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan keterkaitan ini dalam kerangka administrasi keuangan desa, khususnya di Kecamatan Delanggu. Studi ini berupaya mengatasi kesenjangan ini dengan melakukan pengujian empiris di Kecamatan Delanggu, sehingga memberikan kontribusi yang lebih tepat dan relevan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan desa yang efektif dan akuntabel, serta meningkatkan implementasi pencegahan fraud melalui kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan langkah-langkah pengendalian internal.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1 Teori Fraud Triangle

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai teori fraud triangle baik pada sektor swasta maupun publik. Penelitian fraud triangle di sektor swasta lebih sering dilakukan dengan penyalahgunaan aset atau fraud dalam laporan keuangan. Donald R. Cressey memperkenalkan teori ini pada tahun 1953, dapat diidentifikasi bahwasanya terdapat tiga faktor utama atas terjadinya fraud mencakup tekanan, peluang, serta rasionalisasi. [12]

2.2 Pencegahan Fraud

Association of Certified fraud Examiners (ACFE, 2016) menggolongkan fraud sebagai perbuatannya kriminal yang mana disengaja sebagai upaya untuk menipu orang lain melalui manipulasi atau penyebaran informasi palsu. Tindakan ini dapat diupayakan oleh

individu, baik didalam begitu juga diluar organisasi, sebagai upaya untuk mencapai kepentingan diri sendiri maupun kolektif, yang mana berpotensi menyulitkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.[13]

Penelitian [14] menunjukkan bahwasanya pencegahan fraud dapat dicapai melalui pembentukan kerangka pengendalian internal yang kuat, peningkatan aktivitas pengendalian, pengembangan budaya organisasi yang positif, dan peningkatan fungsi audit internal yang efektif. Pernyataan ini menegaskan bahwasanya pencegahan fraud dalam administrasi anggaran desa memerlukan strategi yang holistik dan kohesif. Setiap langkah yang disebutkan saling mendukung untuk menciptakan sistem pengendalian yang lebih handal, mengurangi fraud, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

2.3 Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan memiliki peran sebagai kerangka akuntabilitas dan tanggungjawab dalam tata kelola anggaran desa [3]. Mengikuti pedoman sesuai regulasi yang ditetapkan melalui Permendagri No. 113 Tahun 2014, tata kelola anggaran desa wajib berlandaskan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, serta disiplin. Maksud dari kebijakan ini adalah untuk laporan anggaran dapat dilaksanakan secara teratur dan laporan keuangan aparatur desa dapat disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [15]. Laporan keuangan, tahap akhir dari proses akuntansi, menunjukkan kinerja dan kesehatan keuangan yang berkepentingan [16].

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Untuk mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian internal harus diterapkan. Penerapan pengendalian internal secara efektif dapat meningkatkan keyakinan pada kualitas dan keandalan laporan catatan keuangan, serta memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) [17].

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud

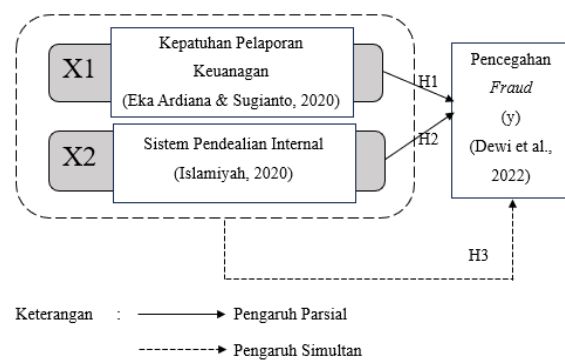
Sebuah studi oleh [3] mengindikasikan bahwasanya kepatuhan dalam pelaporan keuangan mempunyai kontribusi penting dengan arah positif atas upaya pencegahan kecurangan dalam tata kelola dana desa. Dukungan terhadap temuan ini juga datang dari studi yang dikerjakan oleh [7] dan [15], yang sekaligus mengindikasikan bahwasanya kepatuhan pada pelaporan keuangan berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan.

2.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Islamiyah [18] melakukan pengkajian yang memperlihatkan bahwasanya penerapan sistem pengendalian internal memberikan peranan vital dalam memitigasi kecurangan terkait tata kelola dana desa. Kesimpulan ini diperkuat oleh [7] yang memperlihatkan bahwasanya adanya sistem pengendalian internal mampu mendukung usaha pengendalian kecurangan (fraud) dalam tata kelola keuangan desa. Riset oleh [19], [15], dan [4] mengindikasikan bahwasanya variabel-variabel sistem pengendalian internal belum berjalan maksimal untuk mengurangi risiko kecurangan (fraud).

2.5.3 Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Terhadap Pencegahan Fraud

Penelitian oleh [20] membuktikan bahwasanya kepatuhan terhadap pelaporan keuangan bersama dengan sistem pengendalian internal mempunyai dampaknya secara positif maupun signifikan pada upaya pencegahan kecurangan. Mengacu pada teori dan riset terdahulu, dengan pernyataan ini peneliti mampu menggambarkan model kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Berpikir
Sumber: Data primer yang dilolah, 2025

3. Metode yang Diusulkan

Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang mana akan disalurkan secara langsung. Total responden penelitian terdiri dari empat perangkat desa; kepala desa, sekretaris, bendahara, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Delanggu, yang mencakup 16 desa dengan total 64 subjek penelitian. Metode pengambilan sampel melalui keusioner dengan skala likert 5 poin. Kajian ini akan menerapkan analisis regresi linier berganda untuk mengevaluasi implikasi kepatuhan dalam pelaporan keuangan serta pengendalian internal terhadap pengurangan kecurangan (fraud) dalam tata kelola anggaran desa. Definisi serta indikasi masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Variabel Riset

Variabel	Refrensi	Pertanyaan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1)	Eka Ardiana & Sugianto [3]	&1. Di desa kami terdapat peraturan yang jelas mengenai laporan yang akan disusun. 2. Dalam menyusun perencanaan, kami sudah mempertimbangkan aturan dalam perundang-undangan. 3. Terdapat alokasi sumber daya guna proses penyusunan laporan keuangan. 4. Laporan keuangan kas desa tersusun dengan konsisten. 5. Terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan. 6. Terdapat mekanisme pengendalian internal yang efektif guna keakuratan data. 7. Aparat desa menyusun anggaran alokasi dana desa sesuai dana yang ada. 8. Bendahara dengan cermat mencatat setiap transaksi dalam buku besar terkomputerisasi. 9. Pelaporan keuangan dana desa dilakukan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. 10. Laporan keuangan disusun secara jelas, lengkap, terperinci, dan mudah dipahami. 11. Laporan keuangan diaudit secara berkala setiap tahun. 12. Laporan keuangan yang disampaikan mematuhi ketentuan terkait.
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Islamiyah [18]	1. Seluruh aparat desa menerapkan kode etik dan diterapkan secara konsisten. 2. Aparatur desa memiliki komitmen yang kuat terhadap pengendalian internal. 3. Dilakukan identifikasi risiko keuangan dan operasional.

Variabel	Refrensi	Pertanyaan
Pencegahan Fraud (Y)	Eka Ardiana & Sugianto [3]	4. Risiko yang diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat signifikansi.
		5. Aparat desa menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan.
		6. Saya secara konsisten memperoleh dan memberikan informasi kepada semua pemangku kepentingan.
		7. Struktur organisasi berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.
		8. Desa kami melakukan pelatihan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kompetensi aparat desa.
		9. Informasi laporan keuangan dipublikasi dan diidentifikasi dengan baik.
		10. Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara periodik.
		1. Masyarakat kita telah diinformasikan tentang bahaya kecurangan pada pengelolaan dana desa.
		2. Aparat desa memahami definisi fraud yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa.
		3. Aparat desa memahami konsekuensi hukum dari tindakan fraud.
Pencegahan Fraud (Y)	Eka Ardiana & Sugianto [3]	4. Desa kami telah menerapkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran aparata desa agar tidak terjadi tindak fraud.
		5. Pemerintah desa selalu mengevaluasi dan mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan.
		6. Sebagai aparat desa, secara konsisten memberikan contoh penerapan protokol pencegahan fraud.
		7. Kami melibatkan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan agar masyarakat tahu dana desa digunakan untuk apa saja.
		8. Kami telah menyiapkan forum khusus untuk masyarakat desa guna menyampaikan masukan dan laporan terkait penggunaan dana desa.
		9. Kami mengungkapkan pemanfaatan dana desa secara transparan, komprehensif, dan mudah dipahami masyarakat.
		10. Kami melaporkan penggunaan dana dan dipublikasi secara terbuka maupun tertutup dan mudah diakses oleh masyarakat.
		11. Pelaporan secara terbuka sudah menjadi keputusan organisasi.
		12. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan pembagian tugas maupun tanggung jawab yang tertata dengan jelas.
		13. Dokumen-dokumen terkait administrasi dana desa disusun dan disimpan secara sistematis.
		14. Metode pelaporan keuangan dana desa mematuhi peraturan yang berlaku.
		15. Setiap pencatatan transaksi keuangan dapat dilacak dalam sistem yang memadai.
		16. Setiap penerimaan dana desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program secara rinci pada akhir periode.
		17. Kami menanamkan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat dan lembaga pengawas terhadap pengelolaan dana desa.

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Data Responden

Tabel 3. Data Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Presentase (Persen)
Jenis Kelamin	Laki-laki	71	73,4
	Perempuan	17	26,6
	Total	64	100
Usia	21-30 Tahun	9	14,1
	31-40 Tahun	19	29,7
	41-50 Tahun	13	20,3
	51-60 Tahun	23	35,9
	Total	64	100
Pendidikan	SMA/SMK	29	43,5
	D3/S1	35	54,7
	Total	64	100
Jabatan	Kepala Desa	16	25
	Sekretaris	16	25
	Bendahara	16	25
	BPD	16	25
	Total	64	100
Masa Jabatan	2-5 Tahun	8	12,5
	6-9 Tahun	18	28,1
	10-14 Tahun	9	14,1
	>14 Tahun	29	45,3
	Total	64	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 3 membuktikan bahwasanya responden laki-laki mendominasi pada riset ini menjadi mayoritas, dengan nilai sebesar 73,4% berusia 51-60 tahun. Jenjang pendidikan aparat desa tertinggi D3/S1 sebesar 54,7%, sedangkan responden dengan masa jabatan lebih dari 14 tahun menunjukkan bahawa, rata-rata, mereka memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian yang signifikan di masing-masing bidangnya.

4.2 Uji Instrumen

4.2.1 Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Ket
Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1)	X1.1	0,882	0,246	Valid
	X1.2	0,797	0,246	
	X1.3	0,816	0,246	
	X1.4	0,697	0,246	
	X1.5	0,761	0,246	
	X1.6	0,756	0,246	
	X1.7	0,856	0,246	
	X1.8	0,802	0,246	
	X1.9	0,859	0,246	
	X1.10	0,740	0,246	
	X1.11	0,797	0,246	
	X1.12	0,768	0,246	
Sistem Pengendalian Internal (X2)	X2.1	0,820	0,246	Valid
	X2.2	0,913	0,246	
	X2.3	0,813	0,246	
	X2.4	0,799	0,246	
	X2.5	0,840	0,246	
	X2.6	0,875	0,246	
	X2.7	0,741	0,246	
	X2.8	0,828	0,246	

	X2.9	0,821	0,246	
	X2.10	0,897	0,246	
Pencegahan Fraud (Y)	Y1	0,644	0,246	Valid
	Y2	0,806	0,246	
	Y3	0,774	0,246	
	Y4	0,655	0,246	
	Y5	0,695	0,246	
	Y6	0,790	0,246	
	Y7	0,820	0,246	
	Y8	0,722	0,246	
	Y9	0,777	0,246	
	Y10	0,757	0,246	
	Y11	0,765	0,246	
	Y12	0,665	0,246	
	Y13	0,824	0,246	
	Y14	0,778	0,246	
	Y15	0,737	0,246	
	Y16	0,819	0,246	
	Y17	0,808	0,246	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Data pada tabel 4 mengindikasikan bahwasanya nilai r hitung untuk variabel X1, X2, dan Y melebihi koefisien r tabel tercatat sebesar 0,246, dengan demikian menegaskan validitas keseluruhan variabel dinilai.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	r tabel	Status
Kepatuhan Pelaporan Keuangan X1	0,944	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal X2	0,948	0,70	Reliabel
Pencegahan Fraud Y	0,950	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 5 menyajikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,944 untuk X1, 0,948 untuk X2, maupun 0,950 untuk Y. keseluruhan variabel pada riset ini mempunyai nilai $CA > 0,70$ yang menandakan keandalan yang tinggi.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Normalitas	Test Statistik	Asymp.	Keterangan
Normalitas	0,064	0,200	Berdistribusi dengan normalnya

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang ditunjukkan dalam tabel 6 diatas adalah 0,064. Residu menunjukkan bahwasanya data berdistribusi sesuai dengan kurva normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,793	5,183	Tidak terjadinya multikolinearitas

X2

0,762

4,263

**Tidak terjadinya
multikolinearitas**

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Informasi mengenai multikolinearitas yang ditampilkan pada tabel 7 menunjukkan bahwasanya tidak terdapat multikolinearitas, sebab nilai toleransi > 0,10 maupun VIF < 10.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X1)	0,663	Tidak terjadinya heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,596	Tidak terjadinya heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Data pada tabel 8 pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan bahwasanya hasil uji memperlihatkan nilai sig. independen > 0,05, maka ditegaskan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitasnya.

4.3.4 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	T hitung	Sig	Keterangan
(Constant)	9,356	3,638	2,572	0,0001	Berpengaruh dan Signifikan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,841	0,160	6,879	0,000	Berpengaruh dan Signifikan
Sistem Pengendalian Internal	0,768	0,180	4,015	0,003	Berpengaruh dan Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 9 diatas menampilkan hasil analisis regresi linier berganda, dan model regresi untuk kajian ini dapat dinyatakan berikut ini:

$$PF = 9.356 + 0.841KPK + 0.768SPI + \varepsilon$$

Penjelasan hasil persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Konstantanya adalah 9,356 yang menandakan bahwasanya ketika variabel penentu atau independen (kepatuhan dalam pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal) bernilai nol, variabel tujuan atau dependen pencegahan fraud akan sama dengan 9,356.
- Koefisien regresi untuk kepatuhan pelaporan keuangan adalah 0,841 yang menunjukkan bahwasanya setiap pertumbuhan kepatuhan pelaporan keuangan sebesar 1% akan berdampak pada keanikan pencegahan fraud sebesar 0,841.
- Koefisien regresi untuk sistem pengendalian internal adalah 0,786 yang menunjukkan bahwasanya setiap pertumbuhan sistem pengendalian internal yakni 1% mempunyai dampaknya pada kenaikan pencegahan fraud 0,786.

4.4.1 Uji t

Tabel 10 Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Kesimpulan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	6,879	1,998	0,000	H1 Diterima
Sistem Pengendalian Internal	4,015	1,998	0,003	H2 Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 10 menyajikan hasil uji t, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Dampak Kepatuhan Pelaporan Keuangan terhadap Fraud
Hasil analisis uji t mengindikasikan nilai t hitung $6,879 > t$ tabel 1,998, pada level sig. $0,000 < 0,05$. Temuan ini menegaskan bahwasanya kepatuhan dalam pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif atas upaya pencegahan kecurangan pada tata kelola dana desa. Maka H1 terbukti maupun diterima.
- b. Dampak Sistem Pengendalian Internal terhadap Fraud
Perolehan uji-t memperlihatkan nilai t hitung $4,015 > t$ tabel 1,998, pada tingkat sig. $0,003 < 0,005$. Temuan ini menegaskan bahwasanya penerapan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruhnya yang positif terhadap pencegahan kecurangan dalam tata kelola dana desa. Sehingga, H2 mampu diperkuat dan dinyatakan diterima.

4.4.2 Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

Variabel Bebas	F	F tabel	Sig.F	Keterangan
X1, X2	157,796	3,09	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dalam pengujian F ini didapatkan sig. $0,000 < 0,05$, dengan nilai F hit 157,796 > F tabel 3,09. Dari hasil ini memperlihatkan bahwasanya X1 maupun X2 secara simultan mempunyai pengaruhnya yang signifikan pada Y, sehingga keduanya terbukti berperan positif dalam meminimalisir kecurangan.

4.4.3 Uji Determinasi (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,915	0,838	0,833	2,714

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 12 menampilkan hasil uji R^2 , yang menunjukkan nilai R^2 yang disesuaikan sebesar 0,833. Hasil tersebut mengindikasikan bahwasanya 83,3% variasi variabel pencegahan fraud disebabkan oleh variabel keparuhan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sebanyak 16,7% lainnya berasal dari pengaruh faktor eksternal yang tidak tercantum dalam model penelitian, seperti tata kelola perusahaan yang efektif, pengungkapan pelanggaran (whistleblowing), dan lain-lain.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud

Temuan studi ini mengindikasikan bahwasanya kepatuhan terhadap laporan keuangan mengurangi kecurangan dalam tata kelola anggaran desa, sehingga hipotesis pertama (H1) tervalidasi. Hal ini menyiratkan bahwasanya aparatur desa yang lebih efektif dalam pelaporan keuangan berkorelasi dengan peningkatan upaya untuk memitigasi fraud. Dan sebaliknya, jika tingkat kepatuhan terhadap laporan rendah, kemungkinan terjadi fraud juga akan meningkat.

Regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai bentuk dan format laporan keuangan yang diselenggarakan di Kecamatan Delanggu sangat penting untuk menjamin pemanfaatan dana secara tepat, efektif, dan efisien. Selain itu, pelaporan keuangan yang dilakukan secara teratur berdasarkan standar akuntansi yang berlaku meningkatkan kredibilitas laporan keuangan desa. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat

dan berfungsi sebagai langkah preventif yang signifikan dalam upaya pencegahan fraud di tingkat desa.

Temuan ini mendukung studi sebelumnya oleh [3], [15], [4], yang membuktikan kepatuhan pelaporan keuangan berhubungan secara positif dengan pencegahan kecurangan (fraud). Studi ini membantah penelitian sebelumnya oleh [6], yang membuktikan bahwasanya penyajian laporan tidak signifikan dalam meningkatkan pencegahan fraud. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh kualitas implementasi terguasi dan tingkat literasi akuntabilitas aparatur desa di masing-masing wilayah, yang dapat memperngaruhi efektivitas pelaporan keuangan dalam mencegah fraud.

4.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahab Fraud

Temuan studi ini mengindikasikan bahwasanya pengendalian internal mempunyai pengaruhnya yang positif pada pengelolaan dana desa, sehingga H2 terbukti valid. Peningkatan pengendalian internal yang diterapkan oleh aparat desa berkaitan dengan peningkatan langkah-langkah pencegahan fraud. Hal ini menggambarkan pentingnya mekanisme pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Di Kecamatan Delanggu para aparatur desa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengendalian internal yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Aparatur desa di Kecamatan Delanggu, berkomitmen berusaha untuk menerapkan pengendalian internal. Hal ini terlihat dari usaha mereka untuk menciptakan suasana kerja yang aman, inklusif, bebas dari tindakan kasar dan bebas dari kegiatan yang menyimpang. Terdapat pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara teratur mambantu mencegah penyimpangan sejak dini. Akibatnya, mekanisme pengendalian internal yang dibangun di Kecamatan Delanggu efektif meningkatkan integritas pengelolaan anggaran desa.

Temuan studi ini mendukung penelitian sebelumnya oleh [18] dan [7], yang mengindikasikan bahwasanya efktivitas sistem pengendalian internal berdampak positif dalam meminimalisi risiko fraud. Studi ini membantah temuan sebelumnya oleh [19], [15], dan [4], yang membuktikan bahwasanya sistem pengendalian internal kurang memberikan dampaknya yang signifikan pada pencegahan fraud. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh karakteristik kelembagaan, budaya organisasi, dan tingkat kepatuhan terhadap mekanisme pengendalian interbal yang diterapkan di setiap lokasi penelitian.

5. Kesimpulan

Hasil dalam studi ini mengindikasikan kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan mekanisme pengendalian internal berdampak positif guna mencegah fraud dalam tata kelola keuangan desa di Kecamatan Delanggu. Jika pemerintah desa mematuhi persyaratan pelaporan keuangan yang berlaku dan menjalankan sistem pengendalian internal secara efisien, risiko fraud atau penyalahgunaan dana desa dapat dikurangi. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan aturan yang ketat dan memiliki sistem pengendalian yang efektif, agar dana desa dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan semakin meningkat.

Kajian ini memiliki beberapa batasan, terutama karena fokusnya hanya pada Desa Kecamatan Delanggu. Tetntu saja, masih banyak daerah lain yang belum diteliti, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian masa depan harus difokuskan pada pemilihan komunitas dengan standar operasional yang jelas untuk kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan relevan, serta lebih sesuai dengan teori dan hipotesis yang ada. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memasukkan karakteristik tambahan yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud. Misalnya aspek moralitas, whistleblowing, prinsip good corporate governance, serta pengoptimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan yang lainnya agar mendapatkan hasil pengaruh pada tingkat pencegahan fraud.

Daftar Pustaka

- [1] B. B. M. Harianto, Mudjirahardjo and H. N. Wiyaka Agus, "Village Fund Management Accountability in Preventing Bureaucracy Corruption Behavior," *Res. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 12, pp. 24–32, Aug. 2022, doi: 10.7176/RHSS/12-16-03.
- [2] D. Anandya and K. Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Indones. Corrupt. Watch*, pp. 1–51, 2024, [Online]. Available: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Hasil_Pemantauan_Tren_Korupsi_Tahun_2023.pdf)
- [3] T. Eka Ardiana and L. O. Sugianto, "The Influence of Financial Reporting Compliance, Government Personnel Competency Towards Fraud Prevention in Village Fund Management (Case Study in Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)," *Bus. Account. Res. Peer Rev. J.*, vol. 4, no. 4, pp. 1265–1275, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- [4] K. Wonar, S. Falah, and B. J. . Pangayow, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akuntansi, Audit Aset Vol.*, vol. 1, no. 2, pp. 63–89, 2018.
- [5] M. Din, S. Laupe, and M. Iqbal, "The Effect of Local Apparatus Competence, Financial Reporting Compliance and Internal Control Environment on Fraud Prevention: The Role of Local Assistants as Moderation Variable," *Adv. Econ. Bus. Manag. Res.*, vol. 163, pp. 57–60, 2021, [Online]. Available: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- [6] L. N. Rahimah, Y. Murni, and L. Shanti, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan)," *J. Ilm. Ilmu Ekon.*, vol. 6, no. 12, pp. 139–154, 2018.
- [7] E. Sujana, A. K. Saputra, and D. T. H. Manurung, "Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports," *Int. J. Innov. Creat. Chang.*, vol. 12, no. 9, pp. 98–108, 2020, [Online]. Available: www.ijcc.net
- [8] B. Natasia, D. Aprillia, D. Oktaviyanti, D. Setiawan, F. N. Fadila, and E. Meikhati, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Pelaporan Keuangan," *Semin. Nas. CALL Pap. HUBISINTEK*, pp. 74–79, 2021.
- [9] Fajrin FH. FSuwandi M, "Good Village Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Aplikasi SISKEUDES," *ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev.*, pp. 172–186, 2022, doi: <https://doi.org/10.24252/isafr.v3i2.30920>.
- [10] K. Audela and I. Kristianti, "The Effectiveness of Internal Control in Village Fund System," *AFRE (Accounting Financ. Rev.)*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, Mar. 2022, doi: 10.26905/afr.v5i1.7469.
- [11] F. Zahrotin, "Relasi Good Government Pada Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)," *J. Ilm. Raflesia Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–11, Apr. 2022, doi: 10.53494/jira.v8i1.115.
- [12] H. A. Kassem Rasha, "The New Fraud Triangle Model," *J. Emerg. Trends Econ. Manag. Sci.*, vol. 3, pp. 191–195, 2012.
- [13] L. H. Clements and M. Knudstrup, "Which Fraud Investigation Procedures Are Most Often Performed?," *J. Forensic Investig. Account.*, vol. 8, no. 2, pp. 168–178, 2016.
- [14] Amrizal, "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor," Jakarta, 2004.
- [15] K. Akhyaar, A. H. Purwantini, N. Afif, and W. A. Prasetya, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," *KRISNA Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 13, no. 2, pp. 202–217, Jan. 2022, doi: 10.22225/kr.13.2.2022.202-217.
- [16] A. A. Alrahim and P. Wibowo, "Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng," *Jae (Jurnal Akunt. Dan Ekon.)*, vol. 7, no. 3, pp. 80–93, 2022, doi: 10.29407/jae.v7i3.18579.
- [17] N. Sri Mulyati, E. Faridah, and B. Prawiranegara, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Akuntapedia*, vol. 1, no. 1, pp. 60–71, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/akuntapedia/index>
- [18] F. Islamiyah, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patok)," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2020.
- [19] N. K. R. Eldayanti, S. A. P. A. Indraswarawati, and N. W. Yunianisih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integrasi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Hita Akunt. dan Keuang.*, pp. 465–494, 2020, [Online]. Available: www.bpkp.go.id
- [20] M. Bagus Fahreza, W. Sadtyo Nugroho, A. Hakim Purwantini, P. Studi Akuntansi, and F. Ekonomi dan Bisnis, "The 5 th Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi ,," 2022, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id>